

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN MUSTIKAJAYA TAHUN 2025



**KECAMATAN MUSTIKAJAYA
KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia Nya, Kecamatan Mustikajaya Pemerintah Kota Bekasi telah dapat menyelesaikan “RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN MUSTIKAJAYA TAHUN 2025”. Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target Kecamatan Mustikajaya Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 selain itu dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin di capai.

Tersadari oleh kami bahwa Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, kami berharap dengan laporan ini, kebijakan, program dan kegiatan yang kami laksanakan dapat menunjang dan mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua komponen baik aparatur Pemerintah Kota Bekasi maupun masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Mustikajaya maupun pihak lain yang memerlukannya.

Bekasi, 27 Agustus 2025

CAMAT MUSTIKAJAYA,



JAYA EKO SETIAWAN,SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19751005 199603 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MUSTIKAJAYA TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra..	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	30
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah	46
3.3 Program dan Kegiatan	49
BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	62
BAB V PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bekasi melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 06 Tahun 2016 dan Perda No 07 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi menyusun Dokumen Renja Perubahan 2025.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana strategis (RENSTRA) sebagai proyeksi program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah per tahun, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahun yang dituangkan dalam Renstra

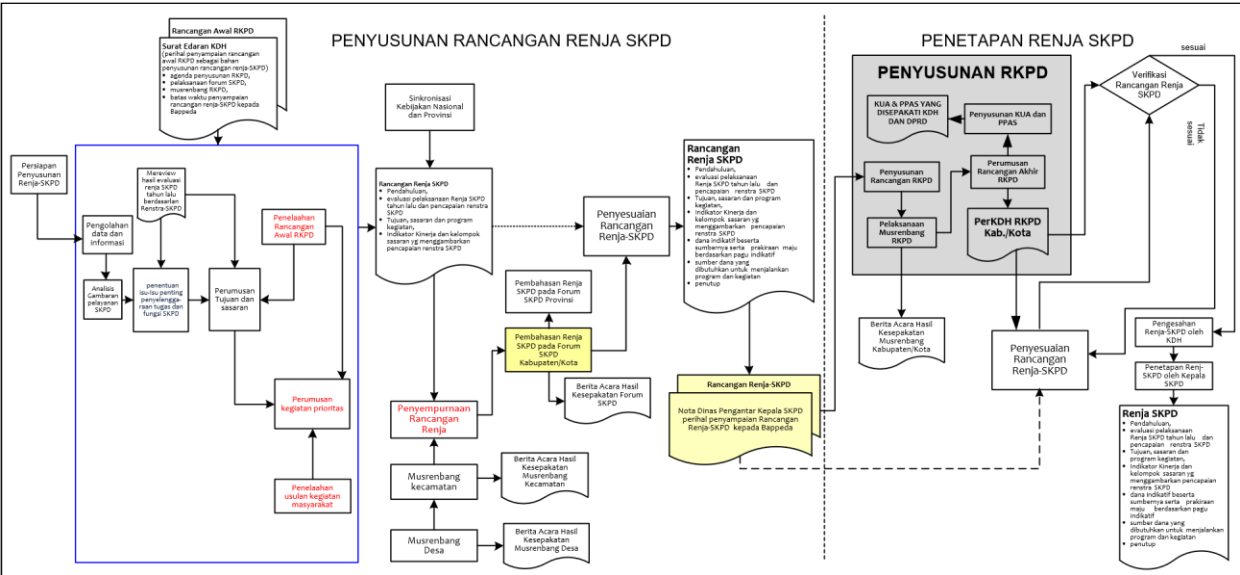
OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi No. 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja Perubahan OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

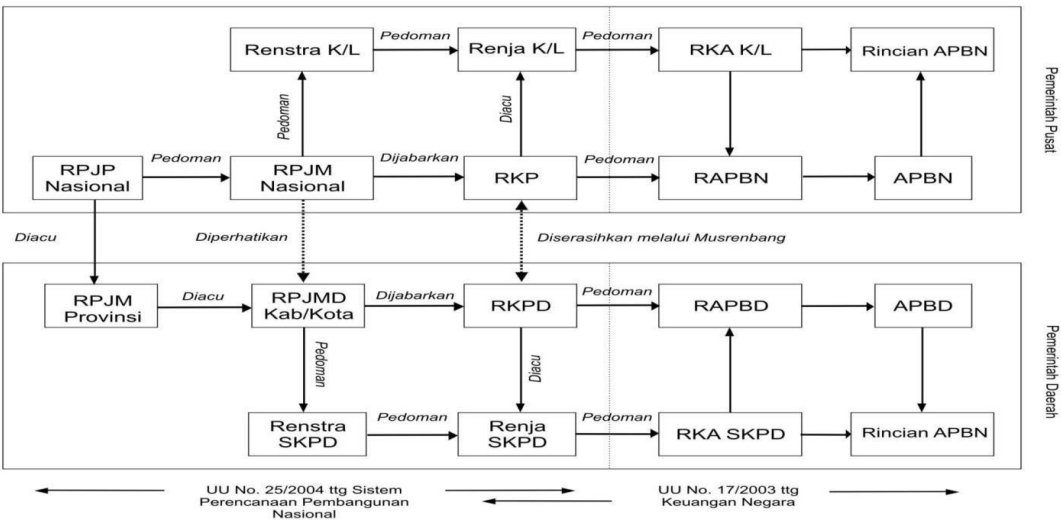
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perubahan
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja Perubahan.
- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja Perubahan
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perubahan OPD;
 - Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - Pembahasan forum OPD; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perubahan OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja Perubahan
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja Perubahan yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja Perubahan.

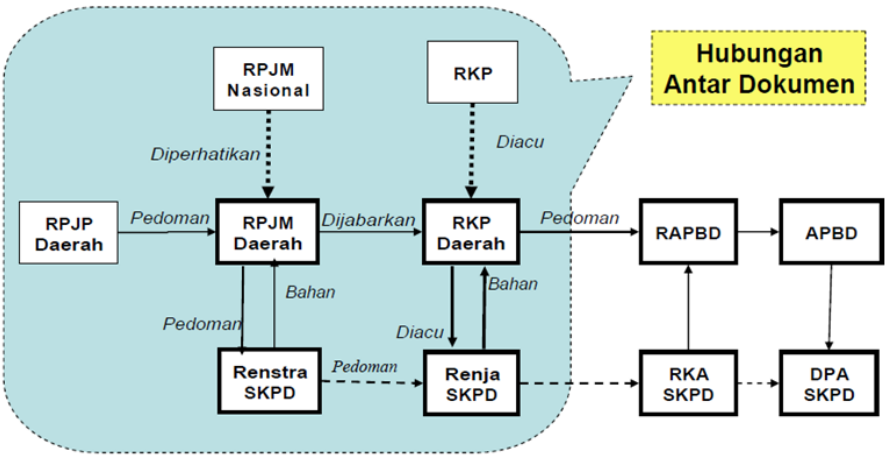
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Perubahan OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Keterkaitan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mustikajaya dengan Renja K/L dapat dilihat dari saling bersinerginya kegiatan yang ada di Renja K/L dengan Renja Perubahan Kecamatan Mustikajaya dalam hal ini terdapat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dimana Indikator Programnya adalah Persentase LKM yang Aktif.

Persentase LKM yang Aktif dapat dilihat pula keterkaitannya dengan Misi Pertama dari Renja K/L yaitu “Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang

semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai “, untuk di Renja Perubahan Kecamatan Mustikajaya terdapat juga Prioritas mengenai Peningkatan Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut proses RAPBD dengan melaksanakan Program Prioritas Kecamatan Mustikajaya adalah :

1. Program Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT;
2. Program Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan intensif bagi ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok penggerak sosial lainnya;
3. Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E)
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.
22. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Penguatan Kapasitas Kader Pos Pelayanan Terpadu Pada Penyuluhan Pelayanan Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kader Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor Seri)
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor Seri)
24. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 31 Seri E)
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 45 Seri E)
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor .27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27 Aseri E).
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 82 Seri E).
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Perubahan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Mustikajaya tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor Pemerintahan Umum selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan tata kelola administrasi di sektor Pemerintahan

Umum serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

Tujuan dibuatnya Renja Perubahan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi adalah untuk:

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mustikajaya tahun 2026;
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Mustikajaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mustikajaya;
4. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil kegiatan pada Kecamatan Mustikajaya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) OPD sebagai bahan penyusunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun seperti yang diterakan di UU No. 25 Tahun 2004, yaitu : Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program-Program dan Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi dan diwujudkan secara partisipasif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen *Stokeholders* Kota Bekasi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mustikajaya mengacu pada panduan Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Kecamatan Mustikajaya, proses penyusunan Renja Perubahan, keterkaitan antara Renja Perubahan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Mustikajaya, dengan Renja Perubahan K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

Kecamatan Mustikajaya, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Mustikajaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Kecamatan Mustikajaya, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam bab ini menjelaskan tentang aspek kewilayahan Kecamatan Mustikajaya, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun 2025 dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai target.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Mustikajaya berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Mustikajaya. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan telaahan terhadap kebijakan nasional landasan hukum serta tujuan dan sasaran Renja Perubahan OPD.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Berisikan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan setahun kedepan serta Pendanaannya.

Bab V. Penutup

Dalam bab penutup akan dijabarkan kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan mengenai fungsi Renja Perubahan atas kinerja tahunan. Disamping itu juga akan diberikan catatan dan harapan Camat Mustikajaya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Mustikajaya ini menyajikan :

1. Hasil Review terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 (Penjabaran Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya)
2. Perkiraan Capaian Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2025 yang sudah disahkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan PD dan Pencapaian Renstra PD, tidak semua program yang telah direncanakan terealisasi 100%. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur mengakibatkan Kecamatan Mustikajaya belum semuanya dapat terealisasi sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan, beberapa kegiatan yang sudah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan diantaranya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Mustikajaya sebesar 88,89 (*delapan puluh delapan koma delapan sembilan*), nilai tersebut didapatkan dari pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan yang ada di Kecamatan Mustikajaya.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas aparatur dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan dan tentu akan menjadi modal dasar potensial yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, Hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan PD dan Pencapaian Renstra PD dapat dilihat Tabel 2.1 dibawah ini.

Dampak yang terjadi dari penjelasan diatas yaitu Kecamatan Mustikajaya harus dapat mensosialisasikan segala Kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat mengenai program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya agar masyarakat bisa merasakan dampak positif dari program yang bersinggungan langsung ke masyarakat.

Kebijakan / Tindakan Perencanaan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Mustikajaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik antara lain melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat disetiap akhir semester yang targetnya telah ditetapkan dan harus tercapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), merenovasi ruang pelayanan Kecamatan

Mustikajaya agar masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan merasa nyaman dan meningkatkan kualitas pegawai kecamatan melalui Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Publik. Terkait dengan kebijakan dan tindakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan persentase capaiannya sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebesar 75% dan juga akan lebih mensosialisasikan Program tersebut kepada masyarakat.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2025 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : KecamatanMustikajaya

Lembar:

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHU 2024	REALISASI SKPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Unsur Kewilayahan								
		Kecamatan Mustikajaya								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 orang/ bulan	672 orang/ bulan	672 orang/ bulan	672 orang/ bulan	672 orang/ bulan	672 orang/ bulan	672 orang/ bulan	672 orang/ bulan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320 kali	320 kali	320 kali	320 kali	320 kali	320 kali	320 kali	320 kali
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik Telepon dan Internet	180 rekening	180 rekening	180 rekening	180 rekening	180 rekening	180 rekening	180 rekening	180 rekening
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor	1740 orang/ bulan	1740 orang/ bulan	1740 orang/ bulan	1740 orang/ bulan	1740 orang/ bulan	1740 orang/ bulan	1740 orang/ bulan	1740 orang/ bulan
					Jumlah Tenaga Kebersihan	72 orang/ bulan	72 orang/ bulan	72 orang/ bulan	72 orang/ bulan	72 orang/ bulan	72 orang/ bulan	72 orang/ bulan	72 orang/ bulan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Lapangan	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan/ Gedung yang terpelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan/ Gedung Kantor	98 unit	98 unit	98 unit	98 unit	98 unit	98 unit	98 unit	98 unit
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Mustikasari	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Padurenan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Cimuning	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
					Jumlah Kegiatan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Event Hari Besar	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event
					Jumlah Event Keagamaan	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
					Jumlah Event Kemasyarakatan	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event

					Jumlah Event Olahraga dan Seni	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
					Jumlah Event Pembinaan Organisasi Kepemudaan	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
					Jumlah laporan Kegiatan MUB Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah laporan Bulanan PKK Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader PKK Kecamatan dan PKP	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket	2 paket
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket	2 paket

				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket	2 paket
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket	2 paket
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib K3	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Tiga Pilar	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
					Jumlah Kegiatan Penertiban Reklame	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan Mustikajaya ikut membantu dalam pencapaian IKK Kota Bekasi. Beberapa IKK memang menjadi tanggung jawab maupun kewenangan Dinas terkait. Namun Kecamatan Mustikajaya yang memiliki tugas yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 juga ikut mendukung capaian IKK tersebut yang berintegrasi dengan UPTD di wilayah maupun langsung ke Dinas. Beberapa IKK yang didukung oleh Kecamatan antara lain :

- a. Rasio rumah Ber-IMB;
- b. Kepemilikan e-KTP;
- c. Peningkatan PAD;
- d. Penghargaan dari pemerintah yang diterima;
- e. Rumah tangga bersanitasi;
- f. Rumah tangga pengguna air bersih;
- g. Rumah layak huni;
- h. Sarana dan Prasarana olahraga;
- i. Kepemilikan akte kelahiran;
- j. Pameran/Expo;
- k. PKK Aktif;
- l. Posyandu Aktif;

Berdasarkan IKK tersebut diatas, maka Kecamatan Mustikajaya memiliki indikator Nilai AKIP yaitu Persentase Nilai AKIP di Kecamatan Mustikajaya. Indikator kesatu ini memiliki target 71 dengan realisasi 74,85 dan diharapkan capaian dapat meningkat setiap tahun.

Kecamatan Mustikajaya selaku OPD yang memiliki pelayanan langsung kepada masyarakat juga perlu melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan indeks kepuasan masyarakat. Sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Kecamatan Mustikajaya memiliki target IKM sebesar 84 (Tahun 2024). Penentuan target berdasarkan hasil evaluasi realisasi IKM diakhir periode Renstra 2013-2018 yaitu 82,5. Di dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 target IKM Kecamatan Mustikajaya dalam rentang waktu 5 tahun berkategori BAIK. Perhitungan IKM juga berpedoman pada peraturan tersebut.

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) wilayah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan di Kecamatan Mustikajaya. Sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Kecamatan Mustikajaya perlu mewujudkan wilayah K3. Target setiap tahun berjenjang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat Mustikajaya. Target yang meningkat setiap tahunnya diharapkan dapat menjaga wilayah yang sebelumnya sudah tertib, bersih dan indah. Penilaian wilayah K3 berdasarkan kategori K3 dalam Perda tersebut.

Pencapaian kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel berikut :

Dalam mencapai tujuan, maka Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mustikajaya dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang telah tertuang dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya
Kota Bekasi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)
1	Persentase LPM Aktif	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase PKK Aktif	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Posyandu Aktif	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Tersedianya Monografi RT,RW Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6	Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat yang mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%
7	Persentase Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Wilayah Tertib K3	Pencegahan Konflik sosial dan penanggulangan terorisme	Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kecamatan Mustikajaya dalam menjalankan atau memberikan pelayanan terhadap masyarakat belum memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal), namun upaya peningkatan kinerja pelayanan di lingkungan Kecamatan Mustikajaya dilakukan secara terukur, yang berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan guna mencapai masing-masing sasaran strategis. sebagaimana tertera pada tabel di atas terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah memiliki formula penghitungannya masing-masing. Rumusan penghitungan/ formulasi tersebut disesuaikan dengan tugas, fungsi dari Kecamatan Mustikajaya sehingga tiap-tiap indikator tersebut memiliki penanggungjawab dari masing-masing seksi yang berbasis data.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2024 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 79,58 %.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Kecamatan Mustikajaya sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam mengimplementasikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan wilayah tertib K3.
4. Sarana dan prasarana dalam pelayanan belum optimal.

Pelayanan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi untuk 3 (*tiga*) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Kecamatan. Adapun tantangan di bidang perdagangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi antara lain sebagai berikut:

Kekuatan (*STRENGTHS*)

1. Letak geografis yang memiliki batas langsung dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi sebagai sentra Industri dan perdagangan;
2. Lokasi Kantor Kecamatan yang berada dalam satu kompleks dengan instansi pemerintahan lainnya (Polsek, Koramil, KUA, UPT, Puskesmas, RSUD Tipe D, Pasar) yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan;

3. Adanya SOP sesuai ketugasan;
4. Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara kelurahan dan kecamatan.

Kelemahan(*WEAKNESSES*)

1. Jumlah personil yang ada dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
2. Belum adanya tenaga teknis berkait pelayanan perizinan;
3. Sarana dan prasarana instansi perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.

Peluang (*OPPORTUNITIES*)

1. Adanya potensi dan sumberdaya sosial, ekonomi/ kelembagaan di wilayah;
2. Adanya komitmen kepala Daerah untuk mengembangkan Kecamatan/ Wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat;
3. Adanya sarana kesehatan (RSUD, Rumah sakit swasta, Puskesmas).

Ancaman (*THREATS*)

1. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi;
2. Tidak adanya sumberdaya alam sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD;
3. Luasnya wilayah sehingga tingkat permasalahan cukup tinggi.

Faktor kunci keberhasilan

1. Adanya peningkatan kapasitas instansi;
2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
3. Adanya kepercayaan kepada birokrat;
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana;
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas Aparatur Pemerintah baik dari aspek intelektualitas, keterampilan maupun mentalitas;
7. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama, kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis untuk dapat mengetahui menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Mustikajaya.

Proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2025, yang di dalamnya memuat sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kecamatan Mustikajaya.

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program yang akan dilaksanakan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mustikajaya. Ruang Lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Bekasi secara keseluruhan.

Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan harus dilaksanakan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi rencana kerja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- Penetapan status hukum naskah perencanaan ini sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat di pertanggungjawabkan;
- Pengkomunikasian/ sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang telah dibuat Perlunya sinergitas

dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Mustikajaya dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Bekasi

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp0)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
	Unsur Kewilayahan				39,951,898,840	Unsur Kewilayahan				39,951,898,840	
	Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum					Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum					
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	21,821,537,240	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	21,821,537,240	
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95.,34				Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95.,34		
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66				Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66		
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100				Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100		

I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10,000,000	SILPA
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13,028,031,200	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13,028,031,200	
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	13,025,031,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	13,025,031,000	DAU, PAD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	3,000,000	SILPA
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	105,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	105,000,000	
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	20,000,000	SILPA

5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	85,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	85,000,000	SILPA
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	475,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	475,000,000	
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	30,000,000	SILPA
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	260,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	260,000,000	SILPA
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	50,000,000	SILPA
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,000,000	SILPA
10.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	30,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	30,000,000	SILPA
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	70,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	70,000,000	SILPA
12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10,000,000	SILPA

V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	199,780,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	199,780,000	
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit	199,780,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit	199,780,000	Pendapatan Bagi Hasil
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhiya ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7,479,726,240	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhiya ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7,479,726,240	
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250,000,000	SILPA
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,229,726,240	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,229,726,240	PAD
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	524,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	524,000,000	
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	70,000,000	SILPA
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	41 unit	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	41 unit	200,000,000	SILPA

			Perizinannya					Perizinannya			
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	54,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	54,000,000	SILPA
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	200,000,000	SILPA
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	180,000,000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	180,000,000	
VIII .	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	120,000,000	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	120,000,000	
20.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD
21.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau	Kel. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	12 dokumen	20,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau	Kel. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	12 dokumen	20,000,000	PAD

	Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
22.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Mustikasari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Mustikasari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	PAD
23.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Padurenan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Padurenan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	PAD
24.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Cimuning	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Cimuning	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	PAD
IX.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan	100 %	60,000,000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Urusan	100 %	60,000,000	

			Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
25.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	60,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	60,000,000	PAD
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase LKM yang Aktif	100%	11,466,949,600	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase LKM yang Aktif	100%	11,466,949,600	
X.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	11,306,949,600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	11,306,949,600	
26.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyarakatan	100,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyaraktan	100,000,000	PAD
27.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	180,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	180,000,000	PAD
28.	Evaluasi Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	30,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	30,000,000	PAD
29.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	360 Pokmas / Ormas	2,702,863,200	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	360 Pokmas / Ormas	2,702,863,200	PAD

			Kelurahan					Kelurahan			
30.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	1,340,664,800	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	1,340,664,800	PAD
31.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pokmas / Ormas	2,280,846,400	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pokmas / Ormas	2,280,846,400	PAD
32.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	2,272,575,200	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	2,272,575,200	PAD
33.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	520,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	520,000,000	DAU
34.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	750,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	750,000,000	DAU
35.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	730,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	730,000,000	DAU
36.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	400,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	400,000,000	DAU
XI.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga	100 %	160,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga	100 %	160,000,000	

			Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
37.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyaraka tan	40,000,000	PAD
38.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikasari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikasari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyaraka tan	40,000,000	PAD
39.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Padurenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Padurenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyaraka tan	40,000,000	PAD
40.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Cimuning	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Cimuning	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyaraka tan	40,000,000	PAD
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	40,000,000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	40,000,000	
XII.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000	
41.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	40,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	40,000,000	PAD
E.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Wilayah Tertib		443,412,000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Wilayah Tertib		443,412,000	
XIII .	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya	100 %	443,412,000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya	100 %	443,412,000	

	Ketertiban Umum		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Ketertiban Umum		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
42.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	50,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	50,000,000	PAD
43.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	393,412,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	393,412,000	PAD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yaitu melalui Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang Kecamatan Merupakan Forum Musyawarah Tahunan Para Pemangku Kepentingan di Tingkat Kecamatan untuk Mendapatkan Masukan mengenai kegiatan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan.

Musrenbang Kecamatan tidak hanya menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di Kelurahan yang di usulkan dari Musrenbang Kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Bekasi Kecamatan Mustikajaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2029. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri sebagai berikut:

Visi Kementerian Dalam Negeri mengikuti visi pemerintah yaitu: **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2020 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2020, sebagai berikut:

T1 :Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara; II-3

- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029, perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dan sasaran yang menjadi dasar target Kecamatan Mustikajaya adalah sebagai berikut:

TUJUAN	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya.
INDIKATOR TUJUAN	: Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
SASARAN 1	: Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya
INDIKATOR SASARAN	: Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik
SASARAN 2	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima pada Kecamatan Mustikajaya
INDIKATOR SASARAN	: Indeks Kepuasan Masyarakat
SASARAN 3	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mustikajaya
INDIKATOR SASARAN	: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mustikajaya

Adapun Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2 adalah sebagai berikut:

Table 3.1
**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN MUSTIKAJAYA
 TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA SASARAN					SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CAR A PENGUKURAN		2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persen (%)	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik / Jumlah Total LKM) x 100 %	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.	75	80	85	90	95	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima pada Kecamatan Mustikajaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Rawalumbu adalah masyarakat yang menerima layanan.	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.	85.2	85.4	85.6	85.8	86	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mustikajaya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mustikajaya	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 5. Bagian Tata Usaha 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.	74.2	74.4	74.6	74.8	75	Hasil Perhitungan dan Laporan

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, Ditinjau dari sisi tugas pembangunan, secara umum tugas Kecamatan Mustikajaya terkait dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029, maka secara khusus tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Tujuan ke 1 Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari dan Tujuan ke 5 Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif.

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Perubahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU 2025 MURNI	PAGU 2025 ABT	KET
1.	1	7	19	21,821,537,240	20,157,617,234	BLPU
2.	4	6	24	12,130,361,600	20,583,879,600	BLU
Jumlah	5	13	43	33,951,898,840	40,741,496,834	

Uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif akan dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:

Program Kecamatan Mustikajaya merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Mustikajaya kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan

Kecamatan Mustikajaya. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Programprogram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kecamatan Mustikajaya namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, seperti yang tertuang dalam visi dan misi kecamatan, setelah dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan. Perlu dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Sebagai Berikut :

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
I.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Mustikajaya
2.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikasari

4.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Padurenan
5.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cimuning
II.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
6.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
III.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
8.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
9.	Evaluasi Kelurahan
10.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Mustikajaya
11.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Mustikasari
12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Padurenan
13.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Cimuning
14.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya
15.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari
16.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan
17.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning
IV.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
18.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya
19.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari
20.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan
21.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning
C.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
V.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
22.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
D.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
VI.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
24.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
E.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
VII.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
VIII.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
26.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
27.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
IX.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
28.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
29.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

X.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
30.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
31.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
32.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
33.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
34.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
36.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
XI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
XII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
38.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
XIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
40.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
41.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
42.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
43.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 Perubahan dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Bekasi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026(N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
	Unsur Kewilayahan									
	Kecamatan Mustikajaya				40,741,496,834				42,721,989,640	
	Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum									
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	20,157,617,234		Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	20,113,148,040	
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95.,34			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95.,34		
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66		
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100		

I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhi-nya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10,000,000		Persentase Terpenuhi-nya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10,000,000	SILPA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10,000,000	SILPA
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhi-nya Iayanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	14,374,070,000		Persentase Terpenuhi-nya Iayanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17,270,547,000	
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	14,371,070,000	DAU, PAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	17,265,547,000	DAU, PAD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	3,000,000	SILPA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	5,000,000	SILPA
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhi-nya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	45,500,000		Persentase Terpenuhi-nya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	105,000,000	
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	13,050,000	SILPA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	0	SILPA
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	32,450,000	SILPA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	0	SILPA
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhi-nya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	459,481,500		Persentase Terpenuhi-nya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	525,000,000	

6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000	SILPA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000	SILPA
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	244,481,500	SILPA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	280,000,000	SILPA
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	50,000,000	SILPA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	50,000,000	SILPA
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,000,000	SILPA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,000,000	SILPA
10.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10,000,000	SILPA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10,000,000	SILPA
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	70,000,000	SILPA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	90,000,000	SILPA
12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10,000,000	SILPA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	SILPA
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	73,880,000		Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	162,373,000	
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	73,880,000	SILPA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	133,923,000	SILPA
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhiya ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,681,803,734		Persentase Terpenuhiya ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,677,228,040	

14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250,000,000	SILPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250,000,000	SILPA
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	4,431,803,734	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,427,228,040	PAD
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	468,000,000		Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	468,000,000	
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	70,000,000	SILPA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	70,000,000	SILPA
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	200,000,000	SILPA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	190,000,000	SILPA
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	54,000,000	SILPA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	58,000,000	SILPA
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	188,882,000	SILPA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150,000,000	SILPA
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	180,000,000		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	310,000,000	
VIII.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Terselenggaranya kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	100 %	120,000,000		Persentase Terselenggaranya kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	210,000,000	

			Umum							
20.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	50,000,000	PAD
21.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD
22.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Mustikasari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD
23.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Padurenan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD
24.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Cimuning	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12 dokumen	20,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12 dokumen	40,000,000	PAD

			Pelayanan Umum				Pelayanan Umum			
II.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mustikajaya	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	60,000,000		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100,000,000	
25.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	60,000,000	PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	100,000,000	PAD
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase LKM yang Aktif	100%	19,955,394,600		Persentase LKM yang Aktif	100%	21,807,729,600	
X.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	19,795,394,600		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	21,647,729,600	
26.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyarakatan	100,000,000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyarakan	100,000,000	PAD
27.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	167,575,000	PAD	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	150,000,000	PAD
28.	Evaluasi Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	17,925,000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	40,000,000	PAD
29.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas / Ormas	6,202,258,200	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas / Ormas	6,800,443,200	DAU

30.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	2,515,553,800	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	2,740,220,800	DAU
31.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pokmas / Ormas	4,940,416,200	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pokmas / Ormas	5,443,939,200	DAU
32.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	5,051,666,400	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	5,573,126,400	DAU
33.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD
34.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD
35.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD
36.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD
XI.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000	
37.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD

38.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikasari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakan	40,000,000	PAD
39.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Padurenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakan	40,000,000	PAD
40.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Cimuning	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakan	40,000,000	PAD
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	21,200,000		Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	40,000,000	
XII.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	21,200,000		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000	
41.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	21,200,000	PAD	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	20,000,000	PAD
E.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Wilayah yang Tertib	100%	471,112,000		Persentase Wilayah yang Tertib	100%	471,112,000	
XIII.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	427,285,000		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	471,112,000	
42.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	50,000,000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	50,000,000	PAD

43.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	377,285,000	PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	421,112,000	PAD
-----	--	------------------	---	------------	-------------	-----	---	------------	-------------	-----

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Terdapat 5 Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mustikajaya dan Kelurahan terdiri dari 13 Kegiatan dan 43 Subkegiatan. Program yang dilakukan oleh Kecamatan Mustikajaya mendukung Program Kota Bekasi tahun 2025-2029.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Ket.
						Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan		
					Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
					Unsur Kewilayahan			33,951,898,840	40,741,496,834		
								21,821,537,240	20,157,617,234	Kec. Mustikajaya	BLPU
								893,412,000	833,985,000	Kec. Mustikajaya	BLU
								3,282,863,200	6,462,258,200	Kel. Mustikajaya	BLU
								2,150,664,800	2,775,553,800	Kel. Mustiksari	BLU
								3,062,575,200	5,200,416,200	Kel. Cimuning	BLU
								2,740,846,400	5,311,666,00	Kel. Padurenan	BLU
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya		A. Program Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	21,821,537,240	20,157,617,234		

					Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95,34	95,34				
					Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66	87,66				
					Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	100 %				
				I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %				
				Sub Kegiatan :							
				1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000		SILPA
				II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	13,028,031,200	14,374,070,000		

					Perangkat Daerah						
				Sub Kegiatan :							
				2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	2100 Orang/Bulan	13,025,031,000	14,371,070,000		PAD DAU
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	12 laporan	3,000,000	3,000,000		SILPA
				III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	105,000,000	45,500,000		
				4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	4 orang	20,000,000	13,050,000		SILPA
				5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	100 orang	85,000,000	32,450,000		SILPA
				IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	475,000,000	459,481,500		
				Sub Kegiatan :							
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 paket	1 paket	30,000,000	30,000,000		SILPA

				Kantor	Disediakan						
			7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	260,000,000	244,481,500		SILPA
			8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	50,000,000	50,000,000		SILPA
			9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	25,000,000		SILPA
			10.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	30,000,000	30,000,000		SILPA
			11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	70,000,000	70,000,000		SILPA
			12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000		SILPA
			V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	199,780,000	73,880,000		
			14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	17 unit	199,780,000	73,880,000		Pendapatan Bagi Hasil
			VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Terpenuhinya	100 %	100 %	7,479,726,240	4,681,803,734		

				Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	250,000,000	250,000,000		SILPA
				16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	7,229,726,240	4,431,803,734		PAD
				VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	524,000,000	512,882,000		
				17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	70,000,000	70,000,000		SILPA
				18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	41 unit	200,000,000	200,000,000		SILPA
				19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	54,000,000	54,000,000		SILPA
				20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	188,882,000	188,882,000		PAD

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima pada Kecamatan Mustikajaya	Indeks Kepuasan Masyarakat		B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	180,000,000	180,000,000		
				VIII. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Mustikajaya	100 %	100 %	120,000,000	120,000,000		
				Sub Kegiatan :							
				21. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	12 dokumen	40,000,000	40,000,000	Kec. Mustikajaya	PAD
				22. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	12 dokumen	20,000,000	20,000,000	Kel. Mustikajaya	PAD

				23.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	12 dokumen	20,000,000	20,000,000	Kel. Mustikasari	PAD
				24.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Padurenan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	12 dokumen	20,000,000	20,000,000	Kel. Padurenan	PAD
				25.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cimuning	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	12 dokumen	20,000,000	20,000,000	Kel. Cimuning	PAD
				IX.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Mustikajaya	100 %	100 %	60,000,000	60,000,000		

				Sub Kegiatan :							
				26.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	60,000,000	60,000,000	PAD
	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	82%	C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKM yang Aktif	100%	100%	11,466,949,600	19,955,394,600	
				X.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	11,306,949,600	19,795,394,600	
				Sub Kegiatan :							
				26.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	100,000,000	100,000,000	PAD
				27.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	180,000,000	167,575,000	PAD
				28.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	1 laporan	30,000,000	17,925,000	PAD

				29. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas / Ormas	360 Pokmas / Ormas	2,702,863,200	6,202,258,200		PAD
				30. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	294 Pokmas / Ormas	1,340,664,800	2,515,553,800		PAD
				31. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300 Pokmas / Ormas	300 Pokmas / Ormas	2,272,575,200	4,940,416,200		PAD
				32. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	243 Pokmas / Ormas	2,280,846,400	5,051,666,400		PAD
				33. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	2 paket	520,000,000	200,000,000		DAU
				34. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	2 paket	750,000,000	200,000,000		DAU
				35. Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan	2 paket	2 paket	730,000,000	200,000,000		DAU

				Prasarana di Kelurahan Padurenan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun						
				36. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	2 paket	400,000,000	200,000,000		DAU
				XI. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	160,000,000	160,000,000		
				37. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasya- katan	2 lembaga kemasyarakat an	40,000,000	40,000,000		PAD
				38. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasya- katan	2 lembaga kemasyarakat an	40,000,000	40,000,000		PAD
				39. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasya- katan	2 lembaga kemasyarakat an	40,000,000	40,000,000		PAD
				40. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasya- katan	2 lembaga kemasyarakat an	40,000,000	40,000,000		PAD
				D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	100 %	40,000,000	21,200,000		
				XII. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Persentase Terselenggaranya Kegiatan	100 %	100 %	40,000,000	21,200,000		

				Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
				Sub Kegiatan :							
				41. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	21,200,000		PAD
				E. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah yang Tertib	100 %	100 %	443,412,000	427,285,000		
				XIII. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	443,412,000	427,285,000		
				44. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	50,000,000	50,000,000		PAD
				45. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	393,412,000	377,285,000		PAD

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Mustikajaya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya rencana kerja Kecamatan Mustikajaya. Ada beberapa catatan penting yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Renovasi Ruang Pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti harus diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan, merenovasi ruang pelayanan agar menjadi lebih nyaman dan Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan yang sekarang akan berjalan menggunakan OSS (*Online System Submission*).

Beberapa hal penting yang perlu untuk mendapat perhatian dalam rencana kerja ini adalah bahwa Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka pendek /dokumen operasionalisasi dari Rencana Strategis yang berdurasi lima tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya dalam proses penyusunannya mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah dengan tolok ukur kinerja adalah capaian RPJMD Kota Bekasi 2025-2029. Proses penyusunan Rencana Kerja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 Perubahan diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat dengan Sekretaris Kecamatan Mustikajaya;

2. Seluruh komponen seksi dan sub bagian pada Kecamatan Mustikajaya agar melaksanakan program-program dalam Rencana kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 Perubahan dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 Perubahan diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya namun juga harus memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 Perubahan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 Perubahan dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Kecamatan Mustikajaya diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 Perubahan, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 Perubahan, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 Perubahan, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing seksi/bagian;
 - b. Camat Mustikajaya menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala seksi melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja seksi periode sebelumnya;
 - d. Camat Mustikajaya menyusun evaluasi rencana kerja berdasarkan hasil evaluasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja Camat Mustikajaya dihadapkan pada hal-hal di luar kendali, maka Konsepsi Strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mustikajaya. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan draft Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025 Perubahan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu lakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian rumusan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Mustikajaya.

PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN MUSTIKAJAYA
Jl. Raya Mustikajaya – Legenda No. 58
Kota Bekasi, Kode Pos 17158
Telepon dan Fax (021)82603561
Email:
mustikajayakecamatan@gmail.com